

Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulan (*Maret, Juni, September dan Desember*) diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan **IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA (IPHI) Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-13.AHA.01.07 Tahun 2013, Tanggal 28 Januari 2013**, bertujuan sebagai wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan aneka permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia khususnya adalangan masyarakat pemerhati hukum pada umumnya. Dalam pengelolaannya, Jurnal Penelitian Hukum De Jure melibatkan berbagai pihak yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Nomor: PPH-86.LT.04.03-Tahun 2020 Tanggal 29 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Penerbitan Jurnal Penelitian Hukum De Jure, dengan susunan Tim sebagai berikut:

Pembina

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pengarah

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Pemimpin Umum/Redaksi (Editor)

Ahyar, S.H., M.H. (Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia (IPHI))

Anggota Dewan Redaksi (Section Editor)

Marulak Pardede, S.H., M.H. (Hukum Ekonomi BALITBANGKUMHAM)
Mosgan Situmorang, S.H., M.H. (Hukum Perusahaan, BALITBANGKUMHAM)
Henry Donald Lb. Toruan, S.H., M.H. (Hukum Perdata, BALITBANGKUMHAM)
Nevey Varida Ariani, S.H., M.Hum. (Hukum Pidana, BALITBANGKUMHAM)
Dr. Hardianto Djanggih, S.H, M.H. (Hukum Pidana, Universitas Muslim Indonesia, Makassar)
Muhaimin, S.H., (Hukum Pidana, BALITBANGKUMHAM)

Redaksi Pelaksana

Fitriyani, S.H., M.Si.

Sekretaris

M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.
Dra. Evy Djuniarti, M.H.
Ibnu Prasetyo, S.H.

Penyunting Tata Bahasa dan Naskah (Copy Editor)

Lindung Budi Mulyawan, S.H.
B. Lora Christyanti, S.IP.
Maria Lusyana Br. Ginting, S.A.P.
Ardyan Gilang Ramadhan, S.Sos.
Amirah Balqis, S.H.

Teknologi dan Sistem Informasi

Machyudhie, S.T.

Mochamad Arip, S.Kom

Harysandy Permana, S.Kom.

Agus Priyatna, S.Kom.

Mitra Bestari

1. Prof. Dr. Hibnu Nugroho
Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman
2. Prof. Dr. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman
3. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H, M.um.
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
4. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
5. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Alamat Redaksi:

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5, Lantai 7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon(021) 2525015, Faksimili (021) 2526438

Email:

balitbangkumham@gmail.com jurnaldejure@yahoo.com ejournaldejure@gmail.com

Percetakan PT Pohon Cahaya

Jalan Gedung Baru 18 Jakarta Barat 11440

Telpon(021) 5600111, Faksimili (021) 5670340

Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual di bidang hukum berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritis, serta berbagai kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat redaksi.

Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 halaman A4, diketik spasi rangkap di *submit* pada aplikasi *Open Journal System (OJS)* pada URL/website: ejournal.balitbangham.go.id

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	iii
ADVERTORIAL	v
KUMPULAN ABSTRAK	vii
 Peran Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional (<i>The Role of Dissenting Opinion of Constitutional Judges in National Legal Reform</i>)	11-10
Sunny Ummul Firdaus, Putri Anjelina Nataly Panjaitan, Rizky Kurniyanto Widyasasmito	
 Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/Puu-Xiv/2016 pada Masyarakat Adat Karuhun Urang Di Cigugur (<i>Implementation of Constitutional Court Decision No.97/PUU-XIV/2016 in Indigenous Community of Karuhun Urang in Cigugur</i>).....	11-24
Sukirno dan Nur Adhim	
 Peran Lembaga Adat di Aceh dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum (<i>Role of Aceh Indigenous Agencies in Resolving of The Children'S Laws Conflicting with Law</i>).....	25-36
Budi Bahreisy	
 Optimalisasi Mediasi Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM (<i>Mediation Optimization Intellectual Property in The Ministry of Law and Human Rights</i>).....	37-48
Jamilus	
 Pengujian Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Peradilan Administrasi (<i>Decisions Examination of Dishonorable Discharge as Civil Servants in the State Administrative Court</i>)	49-70
Fauzi Syam; Helmi; Fitria	
 Beneficial Owner: Mengenal Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana Korporasi (<i>Beneficial Owner: Recognizing The Owners of Benefits in Corporate Crimes</i>).....	71-84
Nevey Varida Ariani	
 Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia (<i>Study of People Smuggling Practices in Indonesia</i>).....	85-102
Muhar Junef	

Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum
di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung
(*Correctional for Children in Conflict with the Law in
at the Class II Children Correctional Institution in Bandung*)..... 103-116

Yuliyanto

Kegiatan Organisasi Sayap Partai Politik yang Bertentangan
dengan UUD 1945 Sebagai Alasan Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi
(*Activities Against Constitution by Political Party Underbow Organization
as Reason for The Dissolution of Political Party by The Constitutional Court*)..... 117-136

Ibnu Sina Chandranegara; Merdiansa Paputungan

Optimalisasi Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan dari Limbah
(*Criminal Sanctions Towards Environmental Quality Violations From Waste*) 137-151

Sumarni Alam

BIODATA PENULIS

PEDOMAN PENULISAN

ADVERTORIAL

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Jurnal Penelitian Hukum De Jure yang diterbitkan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Balitbang Hukum dan HAM), Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia (IPHI) akhirnya bisa kembali menerbitkan Volume 20 Nomor 1 Maret 2020.

Penerbitan-penerbitan Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 20 Nomor 1 Maret 2020 ini, memuat 10 (Sepuluh) tulisan dari akademisi, peneliti Balitbang Hukum dan HAM, dan berbagai institusi lembaga penelitian yang ada di Indonesia. Visi Pemerintahan dalam periode 2019-2014 menempatkan reformasi hukum sebagai aspek yang fundamental dalam arah pembangaunan bangsa. Kebijakan yang dihasilkan harus terdeliverd kepada masyarakat dengan *evidence-based policy*.

Produk perundang-undangan diharapkan semakin memperkuat bahwa perturan yang dibuat sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak menimbulkan hambatan laju perekonomian Negara. Disharmoni peraturan yang ada perlu untuk segera dicarikan jalan keluar yang tepat seperti kepemilikan hak atas tanah, Lingkungan, hutan, pertambangan dan perkebunan yang sering kali menghambat investasi dan Keadilan dalam masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, redaksi Jurnal penelitian de jure dalam Volume 20 Nomor 1 Maret 2020, mengangkat tulisan yaitu hak menguasai Negara dalam jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak atas Tanah dan peruntukannya, Tindak Pidana Pembakaran hutan dan lahan oleh Korporasi untuk membuka usaha lahan perkebunan, dan kebijakan Pengendalian Pencemaran di selat Malaka yang bersumber dari kecelakaan kapal serta peran komisi pemberantasan korupsi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Kami menyampaikan terima kasih kepada penulis yang telah memberikan kepercayaan kepada Jurnal Penelitian Hukum De Jure untuk menerbitkan hasil karyanya.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI dan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia yang telah berkenan dalam penerbitan Jurnal Penelitian Hukum De Jure ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para Mitra Bestari yang telah bersedia membantu, memeriksa dan mengkoreksi tulisan dari para penulis dalam penerbitan ini.

Redaksi

Jakarta, Maret 2020

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Sunny Ummul Firdaus, Putri Anjelina Nataly Panjaitan, Rizky Kurniyanto Widyasasmito

The Role of Dissenting Opinion of Constitutional Judges in National Legal Reform

Law Research Journal De Jure, 2020 March, Volume 20, Number 1, Page 1-10

In the current legal culture in the judiciary, judges have the freedom to carry out judicial activism, including different opinions with other judges who form decisions. Not a few decisions were taken without acclamation because there are judges who submit a dissenting opinion. This paper outlines dissenting opinion as an alternative reference for judges, especially constitutional judges, in carrying out legal reform. This is necessary so that dissenting opinion as alternative legal narratives can enrich and encourage future legal developments. The results showed that dissenting opinion is a product of the interpretation of constitutional judges whose existence guarantees that a decision is born from a futuristic debate. Even though they have no legal power, dissenting opinion can be used as an alternative reference for constitutional judges in examining relatively similar cases. This is because the issue of constitutionality is a growing issue, often even becoming a reference in significant legal reform, so that constitutional judges must explore the law from a variety of relevant perspectives, including making dissenting opinion an alternative reference. This study is expected to be a compass that can show the direction of legal reform going forward..

Keywords: dissenting opinion; reference for judges; constitutional judges; legal reform

Sukirno dan Nur Adhim

***Implementation of Constitutional Court Decision No.97/PUU-XIV/2016
in Indigenous Community of Karuhun Urang in Cigugur***

Law Research Journal De Jure, 2020 March, Volume 20, Number 1, Page 11-24

Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016 states the word "religion" in Article 61 paragraph (1) and Article 64 paragraph (1) of the Population Administration Act is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and does not have conditional binding legal force as long as it is not included "belief". The purpose of this writing is to find out and analyze the implementation of the Constitutional Court Decision at the Ministry of Home Affairs and, Kuningan District Population and Civil Registration Office, and the KaruhunUrang (AKUR) indigenous Cigugur Kuningan community. This research is based on socio-legal research with primary and secondary data collection, and analyzed by prescriptive descriptive analysis with a focus on the issue of how the MK decision was implemented in the AKUR community in Cigugur? and whether the implementation was in accordance with the MK decision. This result concluded Ministry of Home Affairs and Kuningan District Population and Civil Registration Office has implemented the Constitutional Court Decision, but has not substantially implemented the Constitutional Court's decision. The implementation of the two institutions is not in accordance with the original intent of the Constitutional Court Decision stating belief is including religion. The implementation of the Constitutional Court Decision is theoretically influenced by the world religious paradigm. Constitutional Court Decision must be carried out by all government agencies to respect, fulfill and protect believers, including the provision of opportunities to participate in the recruitment of CPNS, TNI and Polri.

Keywords: Constitutional Court Decision Number 97 / PUU-XIV / 2016, AKUR, Belief

**The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

Budi Bahreisy

Role of Aceh Indigenous Agencies in Resolving of The Children'S Laws Conflicting with Law

Law Research Journal De Jure, 2020 March, Volume 20, Number 1, Page 25-36

The problem of diversion, which is intended to avoid children from the judicial process, has been regulated in positive law in Indonesia in the process involving several elements, one of which is a community figure. The problem in this study is how the role of the existing Customary Institutions in dispute resolution, especially the resolution of child criminal cases in conflict with the law. The research method used is the type of normative juridical research with a descriptive-analysis approach. The results showed that the additional criminal provisions were "fulfillment of adat obligations." It shows that the law still recognizes the existence of Customary Law, which is closely related to the Customary Institution in settlement of child criminal disputes. From the initial research conducted, the success rate of diversion is still low due to the non-optimal functioning of this Customary Institution. In Aceh, there is a well-known Traditional Institution whose existence is still recognized. The presence of community leaders through this Customary Institution needs to be reactivated through the rule of law as an initial step in resolving criminal cases of children in conflict with the law. Therefore, suggestion in this research need good councils both in the DPR and in the DPRD who are involved in amending the Criminal Code to consider local customary criminal law that can apply to the community nationally for the common good in this country.

Keywords: customary institutions, children, conflict, law

Jamilus

Mediation Optimization Intellectual Property in The Ministry of Law and Human Rights

Law Research Journal De Jure, 2020 March, Volume 20, Number 1, Page 49-70

An alternative to resolving intellectual property disputes through mediation in the Ministry of Justice and Human Rights established since 2010, but the completion process has not run optimally. Being a question, why mediation of intellectual property in the Ministry of Law and Human Rights is not yet optimal? The purpose of this article to find out what obstacles the Ministry of Law and Human rights are facing in resolving intellectual property disputes through mediation. The research method used normative and empirical legal research with the nature of descriptive research and qualitative analysis approaches. The results showed that alternative intellectual property dispute resolution through mediation at the Ministry of Law and Human Rights had not been running optimally because there were still obstacles, from the institutional, mechanism, and Human Resources (mediator) aspects that had to be reformed. To optimize alternative solutions for intellectual property disputes at the Ministry of Law and Human Rights, the Ministry of Justice and Human Rights needs to establish a Functional Position of Intellectual Property Mediator, as outlined in the Minister of Law and Human Rights Regulation which regulates career paths, credit numbers, the Guidance agency, and the development of Human Resources competencies (mediators) through mediation education and training. then need to develop a mechanism for the settlement of intellectual property disputes through mediation at the Regional Office of the Ministry of Justice and Human Rights.

Keywords: mediation; intellectual property; ministry of justice and human rights

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Fauzi Syam, Helmi, Fitria

Decisions Examination of Dishonorable Discharge as Civil Servants in the State Administrative Court

Law Research Journal De Jure, 2020 March, Volume 20, Number 1, Page 71-84

Different interpretations regarding the norms of Dishonorable Discharge as Civil Servants who committed crimes based on inkracht court decisions before the enactment of the Civil Servant Law. Lead to different applications of law enforcement in practices (dishonorable discharge, honorable discharge, or not dismissed). The different interpretations also reflected in the decisions of State Administrative Court on the lawsuit of Dishonorable Discharge as Civil Servants, both at the level of judex facti and judex juris. Some lawsuits have been granted, rejected, or declared to be not accepted. Legal issues that result from the judge's decisions in the State Administrative Court are fundamental and strategic in determining the back and forth of the development of Indonesian administrative law whose foundation has been regulating in Law No. 30/2014 concerning Government Administration.

Keywords: administrative decision's examination, dishonorable discharge

Nevey Varida Ariani

Beneficial Owner: Recognizing The Owners of Benefits in Corporate Crimes

Law Research Journal De Jure, 2020 March, Volume 20, Number 1, Page 85-102

Corporations are obliged to follow the applicability of the principle to recognize benefit owners from March 1, 2019, the problem is that the principle of the benefit owner is true in the Act of Pidana Corporation, the research aims to support the formation of and the development of law in Indonesia, as well as the basis of policy formulation regarding the application of beneficial owner in the prevention and eradication of corporate criminal acts, with the method of normative research. Based on the results of the study can be concluded that the implementation of the beneficial owner is not effective, it is influenced by the following factors: The strength factor is the existence of a system of applications that reasonably help the owners benefit; Weakness factor is incomplete BO information (up to date) and human resources limitation, there is no risk assessment of BO against criminal offense, low socialization; Opportunity, i.e. acceptance of sanctions; Factorthreat is the absence of a clear definition of the BO and provisions on the nominee shares and there is no check and balance mechanism and supervision between the Ministry or the institution, it is necessary to do changes in the draft Regulation Of the criminal CODE and change of corruption LAWS. Application development to facilitate in conveying benefit owner's information; The provision of corporate notifications that do not declare in the framework of prevention and eradication of Money laundering crimes; Socialization and literacy on the principle of recognizing benefit owners to notary and corporates.

Keywords: Beneficial Owner (BO), and Corporate criminal act

**The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

Muhar Junef

Study of People Smuggling Practices in Indonesia

Law Research Journal De Jure, 2020 March, Volume 20, Number 1, Page 103-116

Indonesia as one of the countries in the world also has a strong potential for the practice of people smuggling. Human smuggling is a form of transnational crime. Transnational crime is not only driven by the factors of free trade which are wide open or weak law enforcement in Indonesia. But it is also supported by Indonesia's geographical area itself. Indonesia, whose geographical shape of the island lies, has many entrances: airports, ports, lands and water boundaries. In addition, Indonesia, which also has a very long coastline, and is an area that is located in a cross position of world trade traffic lanes, is also a major factor causing it to have a strong potential for transnational crime in the form of people smuggling. The problem in this study emphasizes: why is human smuggling still occurring in Indonesia? factors that cause human smuggling in Indonesia continue to flourish ?, efforts should be made to overcome human smuggling in Indonesia ?. This research method uses qualitative legal normative research. Recommendations need to be made about illegal immigrants who fall into the category of victims in human smuggling and cooperation in eradicating transnational crime. The purpose of this study is to determine the extent of Indonesia's policy to tackle the problem of human smuggling in Indonesia. The theoretical benefit of this research is for the development of science, especially immigration law. While the practical benefits as a material consideration for the stakeholders, especially the Directorate General of Immigration in making policies and regulations in the field of immigration.

Keywords: studies, practices, smuggling, people, Indonesia

Yuliyanto

Correctional for Children in Conflict with the Law in at the Class II Children Correctional Institution in Bandung

Law Research Journal De Jure, 2020 March, Volume 20, Number 1, Page 117-136

Regulation Number 11 of 2012 about the Children Criminal Justice System mandates the formation of Children Correctional Institution (LPKA). It is an improvement towards correctional for children in conflict with the law because before LPKA was formed, children were still found being placed at the same correctional institution with adult inmates. The purpose of this study is to find out and analyze the conditions in class II of LPKA in Bandung after Regulation Number 11 of 2012 about the Children Criminal Justice System and the implementation of guidance for children in conflict with the law in class II of LPKA in Bandung. Research issues in this study: first, how is the condition at the Class II of Children Correctional Institution (LPKA) after Regulation Number 11 of 2012 about the Children Criminal Justice System has been in force in supporting the ideal formation of children in conflict with the law?; second, how is the implementation of correctional for children in conflict with the law in Class II of LPKA in Bandung. The research used a qualitative method with a juridical and empirical approach. The result of the study recommend the Directorate General of Correctional Affairs of Ministry of Law and Human Rights to first, prepare LPKA officers from various disciplinary skills and competency, and also qualify specifications in psychology, criminology, criminal law expert, and sociology; second, increase quantity on practice regarding correctional for children in conflict with the law for LPKA officers; and third, improve cooperation with related institutions on giving correctional for children in conflict with the law in.

Keywords: correctional, children, lpka

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Ibnu Sina Chandranegara

Activities Against Constitution by Political Party Underbaw Organization as Reason for The Dissolution of Political Party by The Constitutional Court

Law Research Journal De Jure, 2020 March, Volume 20, Number 1, Page 137-151

This paper intends to analysis relationship between political parties and their Underbaw organizations. The relationship is related to legal liability on violation by Underbaw organization to the provisions of Article 40 of Political Party Law, especially in the case of the dissolution of political parties. This paper is focused on answering two questions (1) What is legal relationship between political parties and Underbaw organization; (2) does legal liability for Underbaw organization is related to responsibility of political party in the case of the dissolution of political parties,. This research using normative approach to determine the dissolution of political parties. This study concludes, first, the legal relationship between the Underbaw Organization and Political Parties is in the same legal entity. In this context, the Underbaw Organization is a non-legal entity organization under (in structure) and belongs to a Political Party. Secondly, the right mechanism for the Underbaw Organization is the same as the mechanism that applies to the political parties themselves. So that when the Underbaw Organization violates the rules regulated in Article 40 of the Political Party Law, the mechanism and sanctions that apply are as stipulated in Articles 47, 48, up to Article 49 Political Party Law.

Keyword: political party underbaw organizations, legal responsibility, political party dissolution

Sumarni Alam

Criminal Sanctions Towards Environmental Quality Violations From Waste

Law Research Journal De Jure, 2020 March, Volume 20, Number 1, Page 137-151

From various facts show that the implementation and enforcement of environmental law so far has been dominated by forms of legal approaches that are repressive. And this approach through repressive methods is ineffective, as evidenced by a false perception of the pattern of solving environmental problems by (in part) community law enforcement officers. Besides, the most serious risk of repressive approach does not refer to the solution the source of the pollution caused. But only to the subject of the polluter and the victim of the pollution. The problem in this research is why repressive methods are not effective in solving environmental law problems? This research is a normative juridical study. Amdal as a tool for controlling environmental impacts is legally obligatory for industrial companies, including the national textile industry, whose activities are likely to have significant and significant impacts that have implications for the existence of environmental sustainability. The author's conclusion is that along with the development of modern criminal law, environmental protection through criminal law enforcement policies is facing with alternatives that provide more protection to the environment or preservation of environmental functions.

Keyword: criminal sanction, quality standard, waste

Kata kunci bersumber dari artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya**

**Sunny Ummul Firdaus, Putri Anjelina Nataly Panjaitan, Rizky Kurniyanto Widyasmito
(Dosen Fakultas Hukum UNS, Peneliti Pusdemtan LPPM UNS)**

Peran *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi Dalam Pembaharuan Hukum Nasional

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 1, Maret 2020, Halaman 1-10

Dalam kultur hukum di peradilan saat ini, hakim memiliki kebebasan dalam melaksanakan aktivisme yudisial, termasuk berselisih pendapat dengan hakim lainnya yang membentuk putusan. Tidak sedikit putusan yang diambil tanpa aklamasi, karena terdapat hakim yang mengajukan dissenting opinion. Tulisan ini menguraikan mengenai dissenting opinion sebagai alternatif referensi bagi hakim, khususnya hakim konstitusi, dalam melakukan pembaharuan hukum. Hal ini diperlukan agar dissenting opinion sebagai narasi hukum alternatif dapat memperkaya dan memberikan dorongan perkembangan hukum di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dissenting opinion merupakan produk penafsiran hakim konstitusi yang keberadaannya memberikan jaminan bahwa suatu putusan lahir dari perdebatan yang futuristik. Kendati tidak memiliki kekuatan hukum, dissenting opinion dapat dijadikan sebagai alternatif referensi bagi hakim konstitusi dalam memeriksa perkara yang relatif sama. Hal ini dikarenakan persoalan konstusionalitas merupakan isu yang terus berkembang, bahkan seringkali menjadi acuan dalam pembaharuan hukum yang signifikan, sehingga hakim konstitusi harus menggali hukum dari berbagai perspektif yang relevan, termasuk di dalamnya menjadikan dissenting opinion sebagai alternatif referensi. Telaah ini diharapkan mampu menjadi kompas yang dapat menunjukkan arah pembaharuan hukum kedepannya.

Kata kunci: dissenting opinion; referensi hukum; hakim konstitusi; pembaharuan hukum

Sukirno dan Nur Adhim (Sub Bagian Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)

**Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-Xiv/2016
pada Masyarakat Adat Karuhun Urang Di Cigugur**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 1, Maret 2020, Halaman 11-24

Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang Undang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, serta masyarakat adat Karuhun Urang (AKUR) Cigugur Kuningan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan socio-legal research, dengan pengumpulan data primer dan data sekunder, dan dianalisis secara deskriptif-analitis preskriptif dengan fokus permasalahan tentang bagaimana implementasi putusan MK pada masyarakat AKUR di Cigugur Kabupaten Kuningan ? dan apakah implementasi tersebut sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi ? Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara formal Kemendagri dan Dukcapil Kabupaten Kuningan telah melaksanakan Putusan MK, tetapi secara substansial belum melaksanakan putusan MK. Implementasi kedua lembaga tersebut tidak sesuai dengan original intent Putusan MK yang menyatakan kepercayaan termasuk agama. Implementasi Putusan MK ini secara teoretis dipengaruhi oleh paradigma agama dunia. Putusan MK ini harus dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah untuk menghormati, memenuhi dan melindungi penganut kepercayaan, termasuk pemberian kesempatan untuk ikut rekrutmen CPNS, TNI dan Polri.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016, AKUR, Kepercayaan

Kata kunci bersumber dari artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya****Budi Bahreisy (Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh)****Peran Lembaga Adat di Aceh dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 1, Maret 2020, Halaman 25-36

Problematika mengenai diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan telah diatur dalam hukum positif di Indonesia dalam prosesnya melibatkan beberapa elemen, yaitu salah satunya adalah tokoh masyarakat. Adapun permasalahan dalam penelitian ini bagaimana peran dari Lembaga Adat yang ada saat ini dalam penyelesaian sengketa, khususnya penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana tambahan adanya “pemuahan kewajiban adat”. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tersebut masih mengakui adanya Hukum Adat yang erat kaitannya dengan Lembaga Adat dalam penyelesaian sengketa pidana anak. Dari penelitian awal yang dilakukan masih rendahnya tingkat keberhasilan diversifikasi disebabkan belum maksimalnya fungsi Lembaga Adat ini. Di Aceh dikenal ada Lembaga Adat yang sampai saat ini masih diakui keberadaannya. Keberadaan tokoh masyarakat melalui Lembaga Adat ini perlu diaktifkan kembali melalui aturan-aturan hukum sebagai langkah awal dalam penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum. Maka dari itu saran dalam penelitian ini perlunya para dewan baik di DPR ataupun di DPRD yang terlibat dalam perubahan KUHP Pidana agar mempertimbangkan pidana adat yang lokal dapat berlaku bagi masyarakat secara nasional untuk kebaikan bersama dalam negeri ini.

Kata kunci: lembaga adat, anak, konflik, hukum**Jamilus (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I)****Optimalisasi Mediasi Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 1, Maret 2020, Halaman 37-48

Alternatif penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui mediasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah dibentuk sejak tahun 2010, namun dalam proses penyelesaiannya belum berjalan secara optimal. Menjadi pertanyaan, mengapa mediasi kekayaan intelektual di Kementerian Hukum dan HAM belum optimal? Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM dalam penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui mediasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan empiris dengan sifat penelitian deskriptif dan pendekatan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui mediasi di Kementerian Hukum dan HAM belum berjalan dengan optimal dikarenakan masih terdapat kendala, dari aspek Kelembagaan, mekanisme, dan Sumber Daya Manusia (mediator) yang harus dilakukan pembenahan. Untuk mengoptimalkan alternatif penyelesaian sengketa kekayaan intelektual di Kemenkumham, maka Kementerian Hukum dan Ham perlu membentuk Jabatan Fungsional Mediator Kekayaan intelektual, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur jenjang karier, angka kredit, instansi Pembina, serta pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (mediator) melalui Pendidikan dan pelatihan mediasi. Serta perlu menyusun mekanisme penyelesaian sengketa KI melalui mediasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Kata kunci: mediasi, kekayaan intelektual, kementerian hukum dan HAM

Kata kunci bersumber dari artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya****Fauzi Syam, Helmi, Fitria (Fakultas Hukum Universitas Jambi)****Pengujian Keputusan Pemberhentian Tidak dengan Hormat
Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Peradilan Administrasi**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 1, Maret 2020, Halaman 49-70

Adanya perbedaan penafsiran atas norma PTDH PNS yang melakukan kejahatan jabatan berdasarkan putusan pengadilan in craht sebelum berlakunya UU ASN, menyebabkan terjadinya perbedaan penerapan penegakan hukum dalam praktik (ada yang diberhentikan tidak dengan hormat, diberhentikan dengan hormat, atau tidak diberhentikan). Perbedaan juga tercermin dalam putusan pengadilan di lingkungan PERATUN atas gugatan PTDH PNS, baik di tingkat judex facti maupun judex juris. Ada gugatan yang dikabulkan, ditolak, atau dinyatakan tidak diterima. Persoalan-persoalan hukum yang muncul dalam putusan hakim di lingkungan PERATUN, bersifat mendasar dan strategis dalam menentukan maju mundurnya pembangunan hukum administrasi Indonesia yang pondasinya telah diatur dalam UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Kata kunci: pengujian; pemberhentian pegawai negeri sipil**Nevey Varida Ariani (Badan Penelitian dan pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan HAM RI)*****Beneficial Owner*: Mengenali Pemilik Manfaat Dalam Tindak Pidana Korporasi**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 1, Maret 2020, Halaman 71-84

Korporasi wajib mengikuti penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat paling lambat 1 Maret tahun 2019, pemusnahan masalah adalah bagaimana prinsip pemilik manfaat sebenarnya dalam tindak pidana korporasi, Penelitian ini bertujuan untuk mendukung pembentukan dan pengembangan Hukum di Indonesia, serta dasar perumusan kebijakan terkait penerapan beneficial owner dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korporasi, dengan metode penelitian yuridir normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan beneficial owner belum efektif, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut: faktor strength yaitu keberadaan sistem aplikasi yang cukup membantu pemilik manfaat; faktor weakness yaitu informasi BO belum lengkap (up to date) dan keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya penilaian risiko BO terhadap Tindak pidana, sosialisasi yang rendah; faktor opportunity (peluang) yaitu penerimaan sanksi; faktorthreat (ancaman) yaitu tidak adanya definisi jelas tentang BO dan ketentuan mengenai saham nominee serta tidak ada mekanisme check and balance serta pengawasan antara kementerian atau lembaga, maka perlu dilakukan perubahan dalam rancangan peraturan perundang-undangan KUHP dan perubahan UU Korupsi. Pengembangan aplikasi untuk memudahkan dalam menyampaikan informasi pemilik manfaat; Pemberian notifikasi korporasi yang tidak melakukan declare dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; sosialisasi dan literasi mengenai prinsip mengenali pemilik manfaat kepada notaris dan korporasi.

Kata kunci: Beneficial Owner (BO), Tindak Pidana Korporasi

Kata kunci bersumber dari artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya**

Muhar Junef (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.)

Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 1, Maret 2020, Halaman 85-102

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia juga memiliki potensi yang kuat untuk terjadinya praktik penyelundupan manusia. Penyelundupan manusia ini merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional bukan hanya didorong oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar atau lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Akan tetapi juga didukung oleh wilayah geografis Indonesia itu sendiri. Indonesia yang bentuk negaranya kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk: bandara, pelabuhan, batas darat dan perairan. Selain itu, Indonesia yang juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan wilayah yang terletak pada posisi silang jalur lalu lintas dagang dunia, juga menjadi faktor utama yang menyebabkannya berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan transnasional dalam bentuk penyelundupan orang. Permasalahan dalam penelitian ini menekankan pada : mengapa masih terjadi penyelundupan manusia di Indonesia?, faktor-faktor yang menyebabkan penyelundupan manusia di Indonesia terus marak?, upaya yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi penyelundupan manusia di Indonesia?. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Rekomendasi perlu dibuat aturan mengenai imigran gelap yang masuk katagori korban dalam penyelundupan manusia dan kerjasama dalam memberantas kejahatan transnasional. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana kebijakan Indonesia untuk memanggulangi masalah penyelundupan manusia di Indonesia. Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum keimigrasian. Sedangkan manfaat praktisnya sebagai bahan pertimbangan bagi para stake holder, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam membuat kebijakan dan peraturan di bidang keimigrasian.

Kata Kunci:kajian, praktik, penyelundupan, manusia, Indonesia

Yuliyanto (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.)

Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 1, Maret 2020, Halaman 103-116

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengamanatkan terbentuknya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini merupakan langkah perbaikan terhadap pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum, karena sebelum dibentuk LPKA, masih ditemukan narapidana anak ditempatkan dalam satu lembaga masyarakatan bergabung dengan narapidana dewasa. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui dan menganalisis kondisi di LPKA Kelas II Bandung setelah berlakunya Undang- Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, dan pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA Kelas II Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil kajian merekomendasikan Direktorat Jenderal Masyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk: pertama, menyiapkan petugas LPKA dari berbagai disiplin ilmu, seperti psikolog, kriminolog, ahli pidana, dan sosiolog; kedua, meningkatkan pelatihan terkait pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bagi petugas LPKA; dan ketiga, meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam memberikan pembinaan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.

Kata kunci: pembinaan, anak, lpka

Kata kunci bersumber dari artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya****Ibnu Sina Chandranegara, Merdiansa Paputungan (Universitas Muhammadiyah Jakarta)****Kegiatan Organisasi Sayap Partai Politik yang Bertentangan dengan UUD 1945 Sebagai Alasan Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 1, Maret 2020, Halaman 137-151

Tulisan ini hendak melakukan analisis yuridis terhadap hubungan antara Partai Politik dan Organisasi Sayap Parpol-nya (OSP). Hubungan dimaksud adalah berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum apabila terjadi pelanggaran oleh organisasi sayap parpol khususnya dalam hal pembubaran partai politik. Tulisan ini difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan, yakni: (1) Bagaimanakah hubungan antara partai politik dengan organisasi sayap partai politik?; (2) Apakah kegiatan OSP yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dimaknai luas dan berdampak terhadap partai politik khususnya dalam sebagai alasan pembubaran partai politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengetahui hubungan hukum dan pertanggung jawaban OSP terkait pembubaran partai politik. Penelitian ini mengambil kesimpulan, Pertama, hubungan hukum antara OSP dan Partai Politik adalah dalam satu entitas hukum (subyek hukum) yang sama. OSP merupakan organisasi bukan badan hukum yang berada di bawah (dalam struktur) dan milik Partai Politik. Kedua, bahwa kegiatan OSP yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat menjadi alasan pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi. Sehingga ketika OSP melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 UU Partai Politik, maka mekanisme dan sanksi yang berlaku adalah sama dengan mekanisme penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 47, 48, sampai dengan Pasal 49 UU Partai Politik.

Kata kunci: organisasi sayap partai politik, pertanggung jawaban hukum, pembubaran partai politik**Sumarni Alam (Dosen Universitas Tarumanegara)****Optimalisasi Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan dari Limbah**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 1, Maret 2020, Halaman 137-151

Dari berbagai fakta menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum lingkungan selama ini didominasi oleh bentuk-bentuk pendekatan hukum yang bersifat represif. Dan pendekatan melalui cara-cara represif ini tidak efektif dilakukan hal ini terbukti dari adanya persepsi yang keliru tentang pola penyelesaian masalah lingkungan oleh (sebagian) aparat penegak hukum masyarakat. Di samping itu, terdapat resiko yang paling serius karena pendekatan represif tidak mengacu pada penyelesaian pada sumber penyebab pencemarannya, akan tetapi hanya pada subjek pencemar serta korban pencemaran. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yakni mengapa cara-cara represif tidak efektif dalam penyelesaian persoalan hukum lingkungan?. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yuridis normatif. Amdal sebagai piranti pengendalian dampak-dampak lingkungan hidup, secara yuridis wajib dimiliki oleh perusahaan-perusahaan industri termasuk industri tekstil nasional yang kegiatannya kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting yang berimplikasi terhadap eksistensi kelangsungan lingkungan hidup. Kesimpulan penulis yaitu seiring dengan perkembangan pidana modern maka perlindungan lingkungan hidup melalui kebijakan penegakan hukum pidana diperhadapkan dengan alternatif yang lebih memberi perlindungan terhadap lingkungan atau pelestarian fungsi lingkungan..

Kata Kunci : sanksi pidana, baku mutu, limbah

